

Analisis Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten

Tasya Fatmawati Wibowo^{1*} dan Daryono Soebagiyo²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah,
Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartosuro Telp (0271) 717417 Surakarta - 57102

*e-mail : tasyafatmawati25@gmail.com

ABSTRAK

Artikel Info

Received :

24 December 2024

Revised :

23 January 2025

Accepted :

22 March 2025

Kata Kunci :

Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah penduduk, Pengeluaran pemerintah, Upah minimum regional, Pendapatan Asli Daerah

Keywords :

Gross Domestic Product, Population, Government expenditures, Wage, Local Income

Pendapatan daerah merujuk pada seluruh penerimaan yang diterima oleh suatu daerah, yang bersumber dari berbagai komponen yang berkontribusi terhadap peningkatan kekayaan bersih daerah tersebut. Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi indikator bahwa pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan efektif, di mana pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mendanai berbagai kegiatan pembangunan secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada dana dari pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beberapa faktor terhadap PAD di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten selama periode 2016 hingga 2020, dengan menggunakan metode analisis regresi data panel. Faktor-faktor yang dianalisis meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan Upah Minimum Regional (UMR). Hasil uji validitas pengaruh dengan menggunakan pendekatan model Fixed Effects menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap PAD, yang berarti semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar potensi penerimaan dari pajak dan retribusi. Sebaliknya, pengeluaran pemerintah terbukti berpengaruh negatif terhadap PAD, mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dalam jangka pendek dapat mengurangi jumlah PAD yang tersedia untuk daerah. Sementara itu, variabel PDRB dan UMR tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PAD pada periode yang dianalisis, menggambarkan kompleksitas hubungan antara faktor-faktor ekonomi dan penerimaan daerah yang memerlukan perhatian lebih lanjut dalam kebijakan pembangunan daerah.

Analysis of Local Revenues of Banten Province

ABSTRACT

Regional revenue refers to all income received by a region, sourced from various components that contribute to the increase in the region's net wealth. High Regional Original Income (PAD) can be an indicator that the implementation of regional autonomy is effective, where local governments have the ability to finance various development activities independently without relying solely on funds from the central government. This study aims to analyze the impact of several factors on PAD in the regencies and cities of Banten Province from 2016 to 2020, using panel data regression

analysis. The factors analyzed include Gross Regional Domestic Product (PDRB), population, government expenditure, and Regional Minimum Wage (UMR). The results of the validity test with the Fixed Effects model approach show that population size has a positive impact on PAD, meaning that the larger the population, the greater the potential revenue from taxes and levies. Conversely, government expenditure has a negative effect on PAD, indicating that an increase in government expenditure in the short term may reduce the PAD available to the region. Meanwhile, the PDRB and UMR variables did not show a significant impact on PAD during the analyzed period, highlighting the complexity of the relationship between economic factors and regional income, which requires further attention in regional development policies.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia serta sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah untuk menciptakan sinergi yang erat antara sektor publik dan sektor swasta, dengan harapan dapat menciptakan peluang lapangan kerja baru serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Widiansyah, 2017).

Indonesia, sebagai negara berkembang, terus berupaya melakukan pembangunan ekonomi yang merata melalui berbagai kebijakan dan inisiatif. Salah satu strategi yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata adalah dengan mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan di tingkat lokal. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan di wilayahnya, serta mengelola sumber daya yang ada untuk meningkatkan perekonomian daerah (Sembiring, 2019).

Pemberian otonomi daerah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki kapasitas untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih efisien, termasuk dalam hal pengelolaan pendapatan daerah. Salah satu tujuan utama dari otonomi daerah adalah agar daerah tidak lagi bergantung pada dana dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan, serta diberi tanggung jawab untuk mencari sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang diperlukan (Siwi, 2017).

Salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari berbagai kegiatan ekonomi di tingkat daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, PAD mencerminkan sejauh mana kemandirian fiskal suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan yang baik terhadap sumber-sumber PAD sangat penting untuk memastikan bahwa penerimaan daerah dapat optimal dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah tersebut (Yasin, 2020).

Provinsi Banten merupakan salah satu kawasan yang memiliki konsentrasi industri yang tinggi, sekaligus menjadi daerah penunjang utama bagi perekonomian DKI Jakarta. Keberadaan berbagai sektor industri yang beroperasi di wilayah ini tidak lepas dari kedekatan geografisnya dengan Jakarta, yang merupakan pusat perekonomian dan permintaan barang serta jasa. Selain itu, biaya tenaga kerja yang relatif lebih rendah di beberapa daerah di Provinsi Banten menjadi alasan penting mengapa banyak perusahaan atau industri memilih wilayah ini sebagai lokasi alternatif untuk menjalankan proses produksi mereka (Sari & Oktora, 2021).

Tingginya aktivitas industri di Provinsi Banten seharusnya dapat menjadi pilar utama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai salah satu sumber utama pembiayaan daerah, PAD yang diperoleh dari sektor industri dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang berfokus pada peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang ekonomi. Peningkatan infrastruktur ini pada gilirannya dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah, yang juga berdampak pada peningkatan PAD secara berkelanjutan. Di samping itu, dengan peningkatan PAD, kesejahteraan masyarakat dapat terwujud melalui penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan kualitas hidup, serta distribusi kesejahteraan yang lebih merata (Yakup & Haryanto, 2021).

Menurut Fadli (2017), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pembiayaan daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pengelolaan wilayah. Peningkatan PAD menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk lebih menggali potensi lokal dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengingat adanya hubungan saling memengaruhi antara kedua variabel tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sebagai indikator kunci pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, mencerminkan aktivitas ekonomi yang terjadi dalam wilayah tersebut. Secara teoritis, terdapat hubungan positif antara PAD dan PDRB, di mana peningkatan PAD akan mendorong kenaikan PDRB melalui penyediaan dana yang lebih besar untuk investasi publik dan pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, pertumbuhan PDRB juga dapat mendukung peningkatan PAD melalui peningkatan penerimaan dari pajak daerah, retribusi, dan sumber-sumber lain yang berasal dari aktivitas ekonomi yang semakin berkembang. Dengan demikian, PAD dan PDRB saling memperkuat satu sama lain dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Mankiw (2007) menyatakan bahwa kelebihan jumlah penduduk, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Populasi yang besar menciptakan kebutuhan konsumsi yang lebih tinggi terhadap barang dan jasa, yang pada gilirannya mendorong peningkatan produksi dan pembukaan lapangan kerja baru. Pertumbuhan populasi juga dapat meningkatkan basis ekonomi daerah melalui peningkatan permintaan lokal, yang mendukung berkembangnya sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, dan jasa.

Dalam konteks Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan jumlah penduduk memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk memperluas basis penerimaan pajak, baik dari pajak konsumsi, seperti pajak daerah dan retribusi, maupun dari pajak pendapatan yang dihasilkan oleh tenaga kerja yang lebih banyak. Selain itu, tingginya jumlah penduduk juga dapat menciptakan potensi pengembangan sektor informal yang turut menyumbang pada dinamika ekonomi. Namun, agar potensi ini terwujud secara optimal, diperlukan kebijakan yang mampu mengatasi tekanan terhadap infrastruktur, lingkungan, dan layanan publik yang sering kali menyertai pertumbuhan populasi. Dengan demikian, peningkatan

jumlah penduduk, jika diimbangi dengan manajemen pembangunan yang efektif, dapat menjadi katalis utama untuk meningkatkan PAD dan memperkuat struktur ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Selain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk, faktor lain yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah memainkan peran penting dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan fasilitas distribusi lainnya. Sarana ini menjadi elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas sistem ekonomi daerah. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Kurniawan et al. (2018), meskipun pengeluaran pemerintah dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang, pengaruhnya terhadap PAD pada jangka pendek sering kali negatif. Hal ini disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek pembangunan yang berskala besar, sehingga manfaat ekonominya baru terasa dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Faktor lainnya yang berkontribusi pada PAD adalah tingkat upah minimum. Upah, sebagai salah satu insentif utama bagi tenaga kerja, dapat mendorong semangat kerja dan produktivitas. Jika tingkat upah meningkat, pendapatan masyarakat, khususnya para pekerja, juga akan meningkat, yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap PAD melalui pajak pendapatan. Selain itu, kenaikan upah juga mendorong daya beli masyarakat, sehingga konsumsi meningkat. Peningkatan konsumsi ini secara tidak langsung meningkatkan PAD melalui pajak konsumsi, seperti pajak daerah dan retribusi. Amalia et al. (2019) menekankan bahwa hubungan antara upah minimum, konsumsi, dan penerimaan pajak daerah ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan penerimaan fiskal secara berkelanjutan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah representasi dari pendapatan yang dihasilkan oleh daerah. Provinsi Banten merupakan kawasan dengan sektor industri yang maju. Dengan populasi penduduk yang semakin meningkat, seharusnya pemerintah Banten mampu mempersiapkannya untuk menjadi penggerak perekonomian dalam upayanya memacu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah di tiap wilayah di Provinsi Banten juga harus lebih mengoptimalkan PAD agar dapat membiayai pengeluaran untuk pembangunan di daerahnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disajikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang arah dan besarnya pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah populasi penduduk, pengeluaran pemerintah, dan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) terhadap PAD Kabupaten atau Kota di Provinsi Banten tahun 2016-2020 dengan menggunakan analisis regresi data panel.

Fadli (2017) melalui metode *Ordinary Least Square* (OLS) menyimpulkan bahwa PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur selama periode 2005 hingga 2016. Sebaliknya, Asmuruf et al. (2015) menemukan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif terhadap PAD di Kota Sorong, meskipun jumlah penduduk tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD pada periode 2000-2013. Effendy dan Harahap (2020), menggunakan analisis regresi dengan metode simultan, menunjukkan bahwa pada model PAD di Kota Tebing Tinggi tahun 2015-2019, konsumsi dan PDRB memiliki pengaruh positif dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,10$, begitu pula dengan jumlah penduduk, sementara retribusi tahun sebelumnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.

Anam & Kusuma (2019), melalui analisis regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effects*, menemukan bahwa UMK, penerimaan pajak, dan PDRB memiliki pengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2015-2019. Sementara itu, Nasir (2019) menyimpulkan bahwa kontribusi terbesar terhadap PAD di Kabupaten/Kota Indonesia selama 2007-2013 berasal dari pajak daerah dan PAD lain yang sah, sedangkan retribusi dan pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

Penelitian Julfiansyah (2013) menggunakan metode OLS dan mendapati bahwa Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan jumlah penduduk tidak memengaruhi PAD di Kota Samarinda pada periode 1985-2006. Sementara itu, Kurniawan et al. (2018) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap PAD, sedangkan investasi swasta dan tenaga kerja tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap PAD di Kabupaten Kutai Barat selama 2004-2015.

METODE

Penelitian ini menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependen, yang mencerminkan penerimaan daerah dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penerimaan dari dinas-dinas terkait, serta penerimaan lainnya. Variabel ini diukur dalam satuan ribu rupiah. Adapun variabel independen yang diteliti meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Penelitian ini berfokus pada hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan PAD di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten selama periode 2016-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten.

Berdasarkan teori ekonomi dan hasil penelitian sebelumnya, dirumuskan beberapa hipotesis, yaitu bahwa PDRB, jumlah penduduk, dan UMK berpengaruh positif terhadap PAD, sedangkan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap PAD. Untuk menganalisis hubungan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi data panel. Model ekonometrik yang diterapkan merupakan modifikasi dari studi Fadli (2017) yang disesuaikan dengan konteks penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang arah dan besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap PAD di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten selama periode yang diamati sebagai berikut:

$$\log(PAD)_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log PDRB_{it} + \beta_2 \log PEND_{it} + \beta_3 \log PP_{it} + \beta_4 \log UMK_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Dimana:

<i>PAD</i>	= Pendapatan Asli Daerah (ribu rupiah)
<i>PDRB</i>	= Produk Domestik Regional Bruto (juta rupiah)
<i>PEND</i>	= Jumlah Penduduk (jiwa)
<i>PP</i>	= Pengeluaran Pemerintah (ribu rupiah)
<i>UMK</i>	= Upah Minimum Kabupaten atau Kota (rupiah)
<i>log</i>	= Operator Logaritma
ε	= <i>Error term</i> (faktor kesalahan)
β_0	= Konstanta
$\beta_1 \dots \beta_4$	= Koefisien regresi variabel independen
<i>i</i>	= Observasi ke <i>i</i>
<i>t</i>	= tahun ke <i>t</i>

Tahapan estimasi model regresi data panel meliputi pendekatan *Common Effects Model* (CEM), *Fixed Effects Model* (FEM), dan *Random Effects Model* (REM); uji pemilihan model dengan menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman; uji kebaikan model; dan uji validitas pengaruh pada model estimator terpilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Estimasi Model Ekonometri

Variabel	CEM		FEM		REM	
	Koefisien	Prob.	Koefisien	Prob.	Koefisien	Prob.
C	6,7217	0,1056	5,1776	0,6449	6,7217	0,0291
log(PDRB)	0,1423	0,1810	-0,4973	0,6458	0,1423	0,0699
log(PEND)	0,3676	0,0004	1,8123	0,0073	0,3676	0,0000
log(PP)	0,3103	0,0447	-0,3937	0,0241	0,3013	0,0072
log(UMK)	0,0416	0,8817	0,5632	0,3274	0,0416	0,8384
R ²	0,7825		0,9073		0,7825	
Adj. R ²	0,7577		0,8709		0,7577	
F-stat.	31,4954		24,9191		31,4954	
Prob.(F-stat)	0,0000		0,0000		0,0000	

Uji Pemilihan Model:

(1) Chow

Cross-section $F(7, 28) = 5,3833$; Prob. $F = 0,0005$

(2) Hausman

Cross-section random $\chi^2(4) = 37,2196$; Prob. $\chi^2 = 0,0000$

Sumber: Hasil output regresi EViews, diolah, 2024.

Berdasarkan hasil uji pemilihan model diketahui bahwa model terpilih adalah *Fixed Effects Model* (FEM). Hasil estimasi lengkap FEM tersaji pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Hasil Estimasi *Fixed Effects Model*

$logPAD_{it} = 5,1776 - 0,4973 PDRB_{it} + 1,8123 logPEND_{it} - 0,3937 logPP_{it} + 0,5632 logUMK_{it}$				
	(0,6458)	(0,0073)*	(0,0241)**	(0,3274)
$R^2 = 0,9073$; DW = 2,8808; F-stat = 24,9191; Prob.(F-stat) = 0,0000				

Sumber: Hasil output regresi Eviews, diolah, 2024.

Tabel 3. Efek dan Konstanta *Fixed Effects Model*

Wilayah	Effects	Konstanta
Pandeglang	-0,3107	4,8669
Lebak	-0,3386	4,8390
Tangerang	-0,9337	4,2439
Serang	0,2135	5,3911
Kota Tangerang	0,1454	5,3230
Kota Cilegon	1,5555	6,7331
Kota Serang	-0,2343	4,9433
Kota Tangerang Selatan	-0,0970	5,0806

Sumber: Hasil output regresi Eviews, diolah, 2024.

Berdasarkan Tabel 2, analisis menunjukkan bahwa probabilitas F sebesar 0,0000, yang secara statistik signifikan pada tingkat kepercayaan 99% ($\alpha < 0,01$). Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen, yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah populasi penduduk, pengeluaran pemerintah, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9073 menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan 90,73% variasi PAD di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, sementara sisanya sebesar 9,27% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, model ini dapat diandalkan untuk memahami hubungan antara variabel-variabel tersebut terhadap PAD secara keseluruhan.

Secara individu, hasil analisis menunjukkan bahwa hanya jumlah populasi penduduk dan pengeluaran pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. Jumlah populasi penduduk menunjukkan pengaruh positif dengan probabilitas empirik t sebesar 0,0073 ($< 0,01$). Koefisien sebesar 1,8123 menunjukkan bahwa setiap kenaikan jumlah penduduk sebesar 1% akan meningkatkan PAD sebesar 1,81%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang lebih besar dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, konsumsi, serta penerimaan pajak daerah, seperti pajak pendapatan dan pajak konsumsi. Sebaliknya, pengeluaran pemerintah menunjukkan pengaruh negatif terhadap PAD dengan probabilitas empirik t sebesar 0,0241 ($< 0,05$). Koefisien negatif sebesar -0,3927 menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 1% akan menurunkan PAD sebesar 0,39%. Hal ini dapat dijelaskan oleh sifat pengeluaran pemerintah yang sering kali memerlukan waktu untuk memberikan dampak positif terhadap perekonomian, terutama jika pengeluaran tersebut digunakan untuk investasi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur.

Tabel 3 memberikan gambaran mengenai konstanta PAD di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Kota Cilegon memiliki konstanta tertinggi, yaitu sebesar 6,7331, yang menunjukkan bahwa daerah ini memiliki potensi PAD yang lebih besar dibandingkan dengan daerah lain, bahkan setelah mempertimbangkan faktor-faktor seperti PDRB, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan UMK. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti struktur ekonomi Kota Cilegon yang ditopang oleh industri besar, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah.

Temuan lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. Salah satu alasan yang mungkin adalah pertumbuhan PDRB di Provinsi Banten, yang pada tahun 2021 tercatat sebesar 5,19% (BPS, 2021), masih berada di bawah target pemerintah daerah sebesar 7%. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD, yang mungkin disebabkan oleh struktur ekonomi yang belum sepenuhnya mendukung pendapatan daerah, seperti minimnya kontribusi dari sektor-sektor yang dikenakan pajak daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nasir (2019), yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PAD di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia pada periode 2007-2013.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan bahwa meskipun variabel-variabel tertentu, seperti jumlah penduduk, memiliki dampak positif yang signifikan terhadap PAD, faktor lain seperti pengeluaran pemerintah dan PDRB memerlukan pengelolaan dan strategi yang lebih efektif untuk memberikan dampak yang optimal terhadap penerimaan daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya kebijakan pembangunan yang terencana dan sinergis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.

Jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap PAD, sehingga jika jumlah penduduk meningkat, maka PAD akan naik. Penduduk atau masyarakat merupakan hal terpenting dalam perekonomian, mereka dapat menjalankan peran sebagai konsumen dan produsen. Baik sebagai konsumen, naiknya penduduk akan meningkatkan PAD melalui pajak barang dan jasa yang mereka konsumsi. Sementara jika sebagai produsen, mereka akan meningkatkan PAD melalui pajak pendapatan dan retribusi izin usaha. Hasil serupa ditemukan oleh (Asmuruf et al., 2015)

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah justru berpengaruh negatif terhadap PAD. Naiknya pengeluaran pemerintah memang akan mempercepat karena pembangunan ataupun perbaikan infrastruktur penunjang perekonomian dapat terlaksana. Akan tetapi, selama periode penelitian, pembangunan yang terjadi merupakan pembangunan besar dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga dialokasikan ke penanggulangan pandemi Covid-19 selama 2019-2020. Hasil ini didukung Astuti et al. (2017) di mana dalam penelitiannya menemukan bahwa pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap PAD.

Upah minimum yang berlaku ditemukan tidak berpengaruh terhadap PAD. Kondisi ini terjadi karena rendahnya jumlah tenaga kerja di sektor formal di Provinsi Banten. Terlebih lagi di beberapa wilayah sistem perekonomiannya masih mengandalkan sektor tradisional seperti perikanan dan pertanian. Dengan demikian, naik atau turunnya upah minimum yang berlaku tidak mempengaruhi PAD. Hasil penelitian ini didukung oleh temuan Megantara et al. (2020) yang menyatakan bahwa upah minimum regional tidak berpengaruh terhadap pendapatan dan pembangunan daerah di Provinsi Bali.

SIMPULAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola dan membiayai kegiatan pembangunan sesuai dengan potensi daerah masing-masing. PAD mencerminkan sejauh mana desentralisasi fiskal dapat diterapkan, yang berfungsi untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan pembangunan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi PAD sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh beberapa faktor ekonomi terhadap PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Banten selama periode 2016-2020. Variabel yang dianalisis mencakup Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah populasi penduduk, pengeluaran pemerintah, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effects Model (CEM), yang memungkinkan untuk mengidentifikasi pengaruh dari masing-masing variabel baik secara individu maupun kolektif terhadap PAD dengan mempertimbangkan perbedaan antar daerah dan variasi temporal.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PAD. Secara teoretis, hal ini dapat dijelaskan melalui mekanisme peningkatan konsumsi dan produksi yang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dengan populasi yang lebih besar, aktivitas ekonomi akan meningkat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada penerimaan pajak, baik dalam bentuk pajak konsumsi maupun pajak pendapatan. Oleh karena itu, jumlah penduduk menjadi salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan PAD. Namun, pengaruh positif ini tidak otomatis

terjadi, karena faktor lain seperti struktur ekonomi, tingkat pendapatan, dan kebijakan fiskal daerah juga turut mempengaruhi.

Sebaliknya, pengeluaran pemerintah menunjukkan pengaruh negatif terhadap PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dalam periode waktu yang dianalisis tidak langsung berdampak positif terhadap pendapatan daerah. Salah satu penyebabnya adalah sifat pengeluaran pemerintah yang cenderung berfokus pada pembangunan jangka panjang, seperti investasi infrastruktur, yang memerlukan waktu untuk memberikan hasil yang signifikan. Dalam jangka pendek, meskipun pengeluaran pemerintah dapat mendorong aktivitas ekonomi, dampaknya terhadap PAD mungkin tidak langsung terlihat karena perluasan infrastruktur atau proyek pembangunan lainnya biasanya memerlukan waktu untuk dapat dioptimalkan dan memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan daerah.

Menariknya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD selama periode 2016-2020. Meskipun secara teori PDRB dapat mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi suatu daerah dan UMK dapat mempengaruhi daya beli masyarakat serta konsumsi domestik, keduanya tidak menunjukkan hubungan yang jelas dengan peningkatan PAD pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Banten. Salah satu kemungkinan yang dapat menjelaskan temuan ini adalah bahwa meskipun PDRB dan UMK dapat berkontribusi pada perekonomian secara umum, pengaruh langsung terhadap penerimaan PAD mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kebijakan fiskal daerah, struktur pajak, dan pengelolaan potensi sumber daya daerah yang lebih spesifik.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PAD di Provinsi Banten. Temuan ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan daerah, sementara pengeluaran pemerintah meskipun memiliki potensi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, dalam jangka pendek justru menunjukkan dampak negatif terhadap PAD. PDRB dan UMK, meskipun secara teoritis relevan, tidak memberikan kontribusi langsung terhadap PAD dalam periode yang dianalisis. Oleh karena itu, kebijakan yang mengoptimalkan potensi jumlah penduduk, meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah, serta mempertimbangkan dinamika ekonomi daerah secara lebih holistik akan sangat penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Banten.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, C. R., Susilowati, D., & Sudarti. (2019). Pengaruh Upah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota Di Jawa Timur Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3(2), 178–193.
- Asmuruf, Makdalena F Rumat, V. A., & Kawung, G. M. V. (2015). Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 732.
- Astuti, A. M., Lestari, A., & Setyawan, Y. (2017). Analisis Regresi Data Panel untuk Mengetahui Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Statistika Industri Dan Komputasi*, 2(1), 1–11.
- Effendy, S., & Harahap, B. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. *Snistek* 3, 4(1), 74–86.
- Fadli, F. (2017). Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli

- Daerah? *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 16(2).
- Kurniawan, A. I., Militina, T., & Suharto, R. B. (2018). Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi. *Inovasi*, 13(2), 82.
- Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi*. Terjemahan Fitria Liza dan Imam Nurmawan. Jakarta: Erlangga.
- Megantara, D. E., Kembar, M., & Budhi, S. (2020). Pengaruh Angka Melek Huruf dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 9(1), 91–119.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30.
- Sari, R. D. P., & Oktora, S. I. (2021). Determinan Produktivitas Tenaga Kerja Industri Manufaktur Besar dan Sedang di Pulau Jawa. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 185–203. <https://doi.org/10.21002/jepi.v21i2.1298>
- Sembiring, E. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Utara, Pembangunan Manusia Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Utara. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition Journal)*, 1(2), 160–170.
- Siwi, H. F. D. (2017). Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18, No.6, 1–11.
- Widiansyah, A. (2017). Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Cakrawala*, XVII(2), 207–215.
- Yakup, A. P., & Haryanto, T. (2021). Pengaruh Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Bina Ekonomi*, 23(2), 39–47.
- Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(2), 465–472.